



**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2 . 12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

  

URAIAN	2018	2017
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Lainnya di Kas Daerah	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.232.514,52	1.866.368,77
Persediaan	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.232.514,52</b>	<b>1.866.368,77</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.005.731.169,27	1.693.128.125,27
Gedung dan Bangunan	26.000.000,00	26.000.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.100.000,00	4.100.000,00
Aset Tetap Lainnya	33.600.000,00	33.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.561.943.022,00)	(1.115.820.244,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>507.488.147,27</b>	<b>641.007.881,27</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>528.720.661,79</b>	<b>642.874.250,04</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	394.008,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2 . 12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

  

URAIAN	2018	2017
Utang Beban	5.511.100,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.905.108,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.905.108,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	522.815.553,79	642.874.250,04
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>528.720.661,79</b>	<b>642.874.250,04</b>



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang disusun dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Prinsip pokok dalam penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam Perwako ini adalah :

- Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat melalui DPRD.
  - Laporan keuangan menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran.
  - Laporan menyajikan posisi aset (kekayaan), kewajiban (hutang), dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
  - Menyajikan arus kas dari posisi awal tahun, mutasi penerimaan dan pengeluaran serta posisi akhir tahun.
-



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

**1) Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat melalui DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui penyampaian laporan keuangan secara periodik.

**2) Manajerial**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

**3) Transparansi**

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

**4) Keseimbangan antar generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan dalam Perwako diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
-



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017;
- 11) Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
- 12) Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan dalam Perda ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan beserta realisasinya yang disusun berdasarkan anggaran setelah perubahan.

#### **2) Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun

---



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

Anggaran 2018 posisi per 31 Desember 2017). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 3) **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

**3) Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**4) Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

**5) Catatan Atas Laporan Keuangan**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai kebijakan keuangan, pencapaian target APBD dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Keuangan terdapat pada poin **“IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan”**.



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

**BAB II**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh sebagaimana dalam APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, adalah anggaran belanja sebesar **Rp 5.433.446.670,00** yang merupakan Total Belanja Tahun 2018, sedangkan di Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja sendiri tidak mengelola Pendapatan.

Secara garis besar, anggaran dan realisasi DPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Anggaran dan Realisasi DPA Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
**Tahun Anggaran 2018**

*(dalam rupiah)*

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
	<b>5.433.446.670,00</b>	<b>5.169.421.268,00</b>

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Belanja yang dianggarkan sebesar **Rp 5.433.446.670,00** direalisasikan sebesar **Rp 5.169.421.268,00** atau **95,14%** dari anggaran.
- 2) Dengan demikian dari anggaran yang semula defisit (**Rp5.433.446.670,00**) dapat direalisasikan menjadi defisit sebesar (**Rp5.169.421.268,00**).
- 3) Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yakni dapat menekan realisasi belanja (efisiensi).



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

**3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan **basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

**Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

**3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

**1) Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**2) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

**3) Surplus/Defisit**

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

**4) Pembiayaan**

**Penerimaan pembiayaan** diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**Pengeluaran pembiayaan** diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

**5) Aset**

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

**6) Kewajiban**

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

**7) Ekuitas**

**Ekuitas** merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan

**3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan khusus dalam tahun 2009 adalah belum dicatat penyusutan atas aset yang dimiliki Pemda.

Belum dicatatnya penyusutan disebabkan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang dapat dijadikan rujukan mengenai besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan.

Kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Neraca per 31 Desember 2018 ini berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**1) Kas**

- (1) Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- (2) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank.
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (sisa UYHD).

**2) Piutang Pajak/Retribusi**

- (1) Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- (2) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT/SKR).

**3) Bagian Lancar dari Tagihan**

- (1) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan.
- (2) Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

**4) Piutang Lainnya**

- (1) Merupakan piutang dana perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Kota Sungai Penuh namun belum diterima sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

**5) Persediaan**

- (1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - (2) Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
  - (3) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
    - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
-



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

**7) Aset Tetap**

- (1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
  - (2) Aset Tetap terdiri atas:
    - Tanah
    - Peralatan dan Mesin
    - Gedung dan Bangunan
    - Jalan, Irigasi dan Jaringan
    - Aset Tetap Lainnya, dan
    - Konstruksi Dalam Pengerjaan
-



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

- (3) Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila Aset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
- (4) Aset Tetap Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2013 belum dilakukan penyusutan.
- (5) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.
- (7) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

**8) Dana Cadangan**

- (1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**9) Aset Lainnya**

- (1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
  - (2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas :
    - Tagihan Penjualan Angsuran
    - Tuntutan Ganti Rugi
    - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfer/BOT)
    - Aset Tak Berwujud
    - Aset Lainnya.
  - (3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
-



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**10) Kewajiban Jangka Pendek**

- (1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Kewajiban Lancar diantaranya terdiri atas :
  - Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
  - Utang Jangka Pendek
- (3) Kewajiban Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**11) Kewajiban Jangka Panjang**

- (1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota/Kota Lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**12) Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah.



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

**BAB IV**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**4.1.1 Pendapatan**

Pendapatan merupakan penerimaan yang diperoleh dari transaksi selama satu tahun periode. Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja tidak mengelola Pendapatan.

<b>4.1.2 Belanja</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
	<b>5.433.446.670,00</b>	<b>4.888.892.152,00</b>

Belanja Tahun 2018 yang dianggarkan dalam APBD adalah Rp5.433.446.670,00 dengan realisasi sebesar Rp5.169.421.268,00 atau 95,14% naik dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp4.888.892.152,00. Adapun rincian belanja diuraikan pada **tabel 4.1** berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rincian Belanja Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
*(dalam rupiah)*

<b>BELANJA</b>	<b>ANGGARAN 2018</b>	<b>REALISASI 2018</b>	<b>%</b>	<b>REALISASI 2017</b>
BELANJA OPERASI	5.339.121.670,00	5.075.162.224,00	95,06	4.760.639.473,00
BELANJA MODAL	94.325.000,00	94.259.044,00	99,93	128.252.679,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.433.446.670,00</b>	<b>5.169.421.268,00</b>	<b>95,14</b>	<b>4.888.892.152,00</b>

<b>4.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
	<b>5.339.121.670,00</b>	<b>4.760.639.473,00</b>

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp5.339.121.670,00 dengan realisasi sebesar Rp5.075.162.224,00 atau 95,06%, naik jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.760.639.473,00 Rincian belanja operasi diuraikan pada **tabel 4.2** berikut:





*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

Belanja Logistik	4.824.000,00	4.824.000,00	0.00
Belanja Bahan dan Peralatan	22.500.000,00	20.793.000,00	(1.707.000,00)
Belanja Telepon	6.000.000,00	5.823.997,00	(176.003,00)
Belanja Air	3.600.000,00	1.665.700,00	(1.934.300,00)
Belanja Listrik	8.400.000,00	8.033.070,00	(366.930,00)
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	10.950.060,00	(1.049.940,00)
Belanja Jasa Iklan Elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	11.200.000,00	(3.800.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Buruh	3.000.000,00	3.000.000,00	(0,00)
Belanja Jasa Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	(0,00)
Belanja Jasa Service	15.000.000,00	14.093.217,00	(906.783,00)
Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	18.880.000,00	(1.120.000,00)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.000.000,00	12.464.320,00	(7.535.680,00)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	3.992.300,00	(3.507.700,00)
Belanja Cetak	98.825.600,00	90.769.500,00	(8.056.100,00)
Belanja Penggandaan	19.425.000,00	16.666.000,00	(2.759.000,00)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	(00,00)
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	26.700.000,00	23.900.000,00	(00,00)
Belanja Sewa Meja/ Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	(00,00)
Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)
Belanja Sewa Alat Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.344.000,00	23.567.000,00	(14.777.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	87.034.000,00	80.134.000,00	(6.900.000,00)
Belanja Makan dan Minum Lembur	63.640.000,00	47.444.000,00	(16.196.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.500.000,00	42.000.000,00	(3.500.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.133.699,00	63.880.000,00	(13.253.699,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	964.101.999,00	937.792.417,00	(26.309.582,00)



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	170.200.000,00	170.200.000,00	(00,00)
Belanja Sosialisasi	38.200.000,00	30.300.000,00	(7.900.000,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan	6.360.000,00	6.360.000,00	(00,00)
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	(00,00)
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	(00,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.137.250.000,00</b>	<b>1.993.639.189,00</b>	<b>(143.610.811,00)</b>

**4.1.2.2 Belanja Modal**

31-12-2018 (Rp)

31-12-2017 (Rp)

**94.325.000,00**

**128.252.679,00**

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp94.325.000,00 terealisasi sebesar Rp 94.259.044,00 atau 99,93%, naik jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 128.252.679,00. Realisasi belanja modal TA 2018 sebesar Rp 94.325.000,00 merupakan realisasi dari belanja peralatan dan mesin dan Mebeleuer. Rincian belanja Modal diuraikan pada **tabel 4.5** berikut:

**Tabel 4.4**  
**Belanja Modal Kelurahan Dusun Baru**

*(dalam rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>NAIK / TURUN</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	33.925.000,00	33.859.044,00	65.956
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	36.400.000,00	36.400.000,00	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>94.325.000,00</b>	<b>94.259.044,00</b>	<b>(65.956,00)</b>

**4.2 Penjelasan atas Neraca**

Neraca merupakan salah satu Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen Pemerintahan Daerah, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya dan keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

<b>4.2.1</b>	<b>Aset</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
		<b>507.488.147,27</b>	<b>641.007.881,27</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kelurahan Dusun Baru sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Sungai Penuh maupun masyarakat.

Nilai Aset Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp507.488.147,27 turun sebesar (Rp 133.519.734,00) atau 79,17% jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp641.007.881,27

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset lainnya sebagaimana diuraikan **Tabel 4.5** berikut:

**Tabel 4.5**  
**Aset Kelurahan Dusun Baru**

*(dalam rupiah)*

<b>ASET</b>	<b>31-Des-18</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>Naik / Turun</b>
Aset Lancar	1.232.514,52	1.866.368,77	633.854,00
Aset Tetap	99.270.001,30	53.698.666,30	45.571.335,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.270.001,00</b>	<b>53.698.666,00</b>	<b>45.571.335,00</b>

<b>4.2.1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0.00.

<b>4.2.1.2</b>	<b>Aset Tetap</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
		<b>99.270.001,30</b>	<b>53.698.666,30</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 99.270.001,30 turun sebesar (Rp 45.571.335,00) atau sebesar 45,91% jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

2017 sebesar Rp 53.698.666,00. Saldo per 31 Desember 2018 telah dikurangi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sebesar (Rp 224.168.249,00). Rincian saldo per jenis Aset Tetap diuraikan pada **Tabel 4.6** berikut.

**Tabel 4.6**  
**Rincian Saldo Aset Tetap**

*(dalam rupiah)*

<b>ASET TETAP</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>31-Des-16</b>	<b>Naik / Turun</b>
Tanah	0.00	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	323.438.250,30	248.988.250,30	74.450.000,00
Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(224.168.249,00)	(195.289.584,00)	(28.878.665,00)
<b>Jumlah</b>	<b>99.270.001,30</b>	<b>53.698.666.30</b>	<b>45.571.335,00</b>

**4.2.1.2.1 Tanah**

**31-12-2018 (Rp)**

**31-12-2017 (Rp)**

**0.00**

**0.00**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00. Nilai ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dengan aset tetap tanah tahun 2017 sebesar Rp 0.00 dikarenakan pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja tidak menganggarkan untuk pengadaan tanah.

**4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin**

**31-12-2018 (Rp)**

**31-12-2017 (Rp)**

**323.438.250,30**

**248.988.250,30**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 323.438.250,30 naik sebesar Rp 74.450.000,00 atau sebesar 23,02% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp 248.988.250.30 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 4.7** berikut.

**Tabel 4.7**  
**Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

<b>Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>		
<b>Saldo Per 31 Desember 2017</b>		<b>248.988.250,30</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	-	
a. Koreksi	-	
b. Belanja Modal	73.600.000,00	
c. Kapitalisasi	850.000,00	
d. Hibah	-	
e. Reklasifikasi	-	
<b>Jumlah</b>	<b>74.450.000,00</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>		
a. Koreksi	-	
b. Ekstrakompitabel	-	
c. Penghapusan	-	
d. Hibah	-	
e. Reklasifikasi	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Per 31 Desember 2018</b>		<b>323.438.250,30</b>

<b>4.2.1.2.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00 Seperti halnya Nilai Aset Tanah. Nilai ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dengan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebesar Rp 0.00 dikarenakan pada tahun 2017 Kelurahan Dusun Baru tidak menganggarkan untuk pengadaan Gedung dan Bangunan.

<b>4.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap yang telah disebutkan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Sungai Penuh serta dalam kondisi siap pakai dan jaringan yang ada di atasnya. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.00 Seperti halnya Nilai Aset Tanah dan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Nilai ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dengan aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp 0.00.



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

<b>4.2.1.2.5</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u> <b>(224.168.249,00)</b>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u> <b>(195.289.584,00)</b>
------------------	-----------------------------	--	--

Akun Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp 224.168.249,00). mengalami kenaikan dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar (Rp 195.289.584,00) merupakan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.8** berikut:

**Tabel 4.8**  
**Akumulasi Penyusutan Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
*(dalam rupiah)*

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31-Des-18</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>Naik / Turun</b>
Peralatan dan Mesin	(224.168.249,00)	(195.289.584,00)	(28.878.665,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(224.168.249,00)</b>	<b>(195.289.584,00)</b>	<b>(28.878.665,00)</b>

<b>4.2.2</b>	<b>Kewajiban</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
--------------	------------------	--	--

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sendiri tidak memiliki kewajiban atau Rp0,00 baik Tahun 2018 maupun Tahun 2017.

<b>4.2.3</b>	<b>Ekuitas</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u> <b>0.00</b>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u> <b>53.698.666.30</b>
--------------	----------------	--	---

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0.00 turun sebesar Rp 53.698.666,30 atau sebesar 0,00% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0.00.

**4.3** **Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)**



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

<b>4.3.1</b>	<b>Pendapatan – LO</b>	<u>31-12-2018 (Rp)</u>	<u>31-12-2017 (Rp)</u>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp0.00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan Pendapatan – LO per 31 Desember 2017. Sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.9** berikut:

**Tabel 4.9**  
**Pendapatan LO Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**

*(dalam rupiah)*

Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik / Turun
Pendapatan Hibah – LO	0.00	0.00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0.00	0,00	0,00
<b>Pendapatan – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4.3.2</b>	<b>Beban – LO</b>	<u>31-12-2018 (Rp)</u>	<u>31-12-2017 (Rp)</u>
		<b>337.898.112,00</b>	<b>241.821.881,00</b>

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Beban Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja dalam tahun 2018 mempunyai saldo sebesar Rp 337.898.112,00 turun sebesar (Rp 96.076.301,00) atau 39,73% jika dibandingkan dengan saldo beban LO tahun 2017 sebesar Rp96.076.301.00 Rincian Beban - LO diuraikan pada **Tabel 4.10** berikut:

**Tabel 4.10**  
**Beban Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**

*(dalam rupiah)*

Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik / Turun	%
Beban Pegawai - LO	0.00	0.00	0.00	0,00
Beban Barang dan Jasa	309.019.447.00	203.860.100.00	105.159.347.00	51,58
Beban Penyusutan dan Amortisasi	28.878.665,00	37.961.711,00	(9.083.046.00)	(23,93)
Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>337.898.112.00</b>	<b>241.821.811.00</b>	<b>96.076.301.00</b>	<b>39,73</b>

<b>4.3.2.1</b>	<b>Beban Pegawai – LO</b>	<u>31-12-2018 (Rp)</u>	<u>31-12-2017 (Rp)</u>
----------------	---------------------------	------------------------	------------------------



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

0.00

0.00

Beban Pegawai – LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan beban pegawai – LO per 31 Desember 2017.

<b>4.3.2.2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
		<b>309.019.447.00</b>	<b>203.860.100.00</b>

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 309.019.447.00 turun (Rp 105.159.347,00) atau 51.58% jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp203.860.100.00 sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.11** berikut:

**Tabel 4.11**  
**Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Nilai
Belanja Alat Tulis Kantor	15.752.850,00
Belanja Telepon	90.000,00
Belanja Listrik	476.476,00
Belanja Cetak	2.250.000,00
Belanja Penggandaan	5.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.027.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.550.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.932.621,00
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	9.000.000,00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.280.000,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00
Belanja Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00
Belanja Honorarium Pemeriksa Barang	325.000,00
Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	34.980.000,00
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.880.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>309.869.447,00</b>

<b>4.3.2.2</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<u><b>31-12-2018 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2017 (Rp)</b></u>
		<b>28.878.665.00</b>	<b>37.961.711.00</b>

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 28.878.665.00 turun (Rp 9.083.045,00) atau 51.58% jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 37.961.711 .00 sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.12** berikut:



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

**Tabel 4.12**  
**Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.258.715,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	337.160,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	4.834.711,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.206.627,00
Beban Penyusutan Komputer	11.635.610,00
Beban Penyusutan Alat Studio	100.000,00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	505.842,00
Jumlah	28.878.665,00

**4.3.3 Surplus/Defisit LO**

	<u>31-12-2018 (Rp)</u>	<u>31-12-2017 (Rp)</u>
	<b>(337.898.112.00)</b>	<b>(241.821.881.00)</b>

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 defisit sebesar (337.898.112.00) turun sebesar (96.076.302,00) atau 39.73% dibandingkan dengan Surplus/Defisit per 31 Desember 2017 sebesar (241.821.811.00) sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.12** berikut:

**Tabel 4.13**  
**Surplus/Defisit LO Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik / Turun
Pendapatan – LO	0.00	0.00	0,00
Beban _ LO	337.898.112.00	241.821.811.00	96.076.302,00
<b>Surplus / Defisit - LO</b>	<b>(337.898.112.00)</b>	<b>(241.821.811.00)</b>	<b>(96.076.302.00)</b>

**4.4 Penjelasan atas LPE**

	<u>31-12-2018 (Rp)</u>	<u>31-12-2017 (Rp)</u>
	<b>99.270.001,30</b>	<b>53.698.666.30</b>

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.53.698.666.30 turun sebesar (Rp 37.961.720.00) atau sebesar 70,69% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 sebesar Rp 91.660.386,30. Rincian Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebagaimana diuraikan pada **tabel 4.13** berikut:

**Tabel 4.14**  
**Ekuitas Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>53.698.666.30</b>	<b>91.660.386.30</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO	(337.898.112.00)	(241.821.811.00)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(9.00)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>99.270.001.30</b>	<b>53.698.666.00</b>





*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB V**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**5.1 Organisasi SKPD**

Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu tugas pokok Kecamatan, dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kota;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Menertibkan Perizinan; dan
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
- 3) Kabid-Kabid
- 4) Kasi
- 5) Kasi
- 6) Staff Pelaksana

**5.2 Keadaan pegawai SKPD**

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 18 orang sebagaimana pada **tabel 5.1** berikut.

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja**

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	

---



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

1	Kepala Dinas			1		1
2	Sekretaris					
3	Kabid					
4	Kabid					
5	Kasi					
6	Staff Pelaksana					
<b>JUMLAH</b>						





*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1. *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Pendapatan tidak dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja. Sedangkan Belanja yang dianggarkan pada Tahun 2018 sebesar Rp 5.433.446.670,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.169.421.268,00 naik sebesar Rp 264.025.406,00 atau 95,14% jika dibandingkan Belanja Tahun 2017 sebesar Rp 4.888.892.152,00.
2. *Dalam Neraca:* posisi per 31 Desember 2018, nilai Aset sebesar Rp507.488.147,27, turun sebesar Rp. 133.519.734,00 atau 45,91% jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp641.007.881,27. Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.905.108,00, tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00. Sedangkan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp522.815.553,79, naik sebesar Rp.45.571.335,00 atau 45,91% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 642.874.250,04.
3. *Dalam Laporan Operasional:* Saldo Pendapatan LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 00.00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan Saldo Pendapatan LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.00.00. Sedangkan Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp.337.898.112.00 naik sebesar Rp. 96.076.301,00 atau 39,73% dibandingkan dengan Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 241.821.811.00. Sedangkan Surplus/Defisit LO untuk tahun 2018 sebesar (Rp. 377.898.112.00) turun sebesar (Rp 96.076.301,00) jika dibandingkan Surplus/Defisit LO tahun 2017 sebesar (Rp. 241.821.811.00).
4. *Dalam Laporan Perubahan Ekuitas:* Ekuitas Awal Tahun 2018 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar Rp.53.698.666,30 dan Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp.337.898.112,00). Sedangkan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp. 00,00 sehingga nilai Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 99.270.001,30



*Catatan atas Laporan Keuangan*  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2018**

---

Sebagai bagian penutup dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Tahun 2018, penyusunan CaLK sebagai dukungan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan Kelurahan Dusun Baru yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. LPj Keuangan tersebut merupakan tekad kami dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun demikian, sebagai sesuatu yang baru dan terus berkembang, Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan dalam pembuatan CaLK ini guna untuk menciptakan Laporan yang Akuntabel dan Transparan.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN  
TENAGA KERJA

Ir. MUSWADI, MM

NIP. 19641103 199203 1 004



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**Urusan Pemerintahan** : 2                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
**Bidang Pemerintahan** : 2 . 12              Penanaman Modal  
**Unit Organisasi** : 2 . 12 . 01              Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 12 . 01 . 01      Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 5	Dana Desa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	5.318.603.774,25	5.021.118.241,23	297.485.533,02	5,92
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	2.204.303.143,00	2.031.381.201,00	172.921.942,00	8,51
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	471.744.108,00	581.451.563,00	(109.707.455,00)	(18,87)
9 . 1 . 2	Beban Jasa	1.317.957.827,00	1.241.283.811,00	76.674.016,00	6,18
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	56.423.691,25	49.699.841,23	6.723.850,02	13,53
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	1.001.672.417,00	851.762.711,00	149.909.706,00	17,60
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	257.846.588,00	249.936.614,00	7.909.974,00	3,16
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00

**Urusan Pemerintahan** : 2                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
**Bidang Pemerintahan** : 2 . 12              Penanaman Modal  
**Unit Organisasi** : 2 . 12 . 01              Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 12 . 01 . 01      Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	8.656.000,00	15.602.500,00	(6.946.500,00)	(44,52)
9 . 1 . 10	Beban Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 11	Beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 12	Beban Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(5.318.603.774,25)	(5.021.118.241,23)	(297.485.533,02)	5,92
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(5.318.603.774,25)	(5.021.118.241,23)	(297.485.533,02)	5,92
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(5.318.603.774,25)	(5.021.118.241,23)	(297.485.533,02)	5,92

SUNGAI PENUH, 31 Desember 2018  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN  
 TENAGA KERJA**

Ir.MUSWADI,MM

NIP. 19641103 199203 1 004



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2 . 12	Penanaman Modal
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

  

<b>URAIAN</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
EKUITAS AWAL	642.874.250,04	746.488.768,47
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.318.603.774,25)	(5.021.118.241,23)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	29.123.810,00	28.611.570,80
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.169.421.268,00	4.888.892.152,00
EKUITAS AKHIR	522.815.553,79	642.874.250,04

SUNGAI PENUH, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN  
TENAGA KERJA**

**Ir.MUSWADI,MM**

NIP. 19641103 199203 1 004



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 2 . 12	Penanaman Modal
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 12 . 01 . 01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
2	<b>BELANJA</b>	5.433.446.670,00	5.169.421.268,00	95,14	4.888.892.152,00
2 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.339.121.670,00	5.075.162.224,00	95,06	4.760.639.473,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.201.871.670,00	3.081.523.035,00	96,24	2.728.471.201,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	2.137.250.000,00	1.993.639.189,00	93,28	2.032.168.272,00
2 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	94.325.000,00	94.259.044,00	99,93	128.252.679,00
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	94.325.000,00	94.259.044,00	99,93	128.252.679,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.433.446.670,00)	(5.169.421.268,00)	95,14	(4.888.892.152,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(5.433.446.670,00)	(5.169.421.268,00)	95,14	(4.888.892.152,00)

SUNGAI PENUH, 31 Desember 2018  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN  
TENAGA KERJA**

**Ir.MUSWADI,MM**

NIP. 19641103 199203 1 004